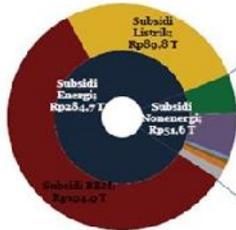




**Target Berbanding Realisasi Angka Kemiskinan**  
(dalam persen dari jumlah penduduk Indonesia)



Sumber : Kementerian Keuangan



# PEDOMAN PENYUSUNAN L P P D TAHUN 2015

## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2004.

Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 27 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri Pemda (self-assessment) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing Pemda sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah.

Tata cara penyusunan LPPD dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang akan menjadi agenda pembahasan utama dalam pertemuan hari ini.

Secara spesifik, pertemuan sosialisasi hari ini akan membahas berbagai aspek yang menyangkut penyusunan LPPD Tahun 2015 antara lain format, instrumen hingga petunjuk pengisian capaian kinerja yang digunakan dalam LPPD.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
1. SE Mendagri Nomor 120.04/5043/OTDA, tanggal 10 Desember 2014 .....	
2. SE Mendagri Nomor 120.04/385/OTDA, tanggal 3 Februari 2014 .....	
3. SE Mendagri Nomor 120.04/7303/OTDA, tanggal 26 Desember 2012 .....	
4. Lampiran SE 120.04/7307/OTDA/2012, tanggal 26 Desember 2012 .....	
5. SE Mendagri Nomor 120.04/1050/OTDA, tanggal 15 Februari 2012 .....	
6. SE Mendagri Nomor 120/313/OTDA, tanggal 24 Januari 2011 .....	
7. Format Penyusunan LPPD (Format sampul) .....	1
8. Petunjuk Pengisian IKK .....	11
9. Program Nasional.....	29
10. Lampiran: .....	48
a. Prioritas Pembangunan Nasional .....	48
b. Template Provinsi .....	49
c. Template Kota .....	72
d. Template Kabupaten .....	91
11. Modul Pengisian IKK	





Jakarta, 31 Desember 2015

Kepada Yth.

Sdr. Gubernur

Sdr. Bupati

Sdr. Walikota

di-

**SELURUH INDONESIA**

**Surat Edaran**

**Nomor : 120.04./7504/OTDA**

**Tentang**

**Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat, bersama ini dengan hormat dimohon perhatian Saudara Gubernur, Bupati dan Walikota terkait dengan penyusunan LPPD tahun 2015, hal-hal sebagai berikut :

1. Format penyusunan LPPD tahun 2015 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip, baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/5043/OTDA tanggal 10 Desember 2014 perihal Penyusunan LPPD Tahun 2014;
2. Dalam penyusunan LPPD tahun 2015 agar memperhatikan penyesuaian dan penyempurnaan redaksional pada Tataran Pengambil Kebijakan, Tataran Pelaksana Kebijakan dan Pelaksanaan Urusan; (terlampir)
3. Mengingat LPPD tahun 2015 akan menjadi pedoman pelaksanaan EKPPD tahun 2016 dan rujukan Kementerian/Lembaga maka agar setiap capaian kinerja dalam LPPD harus didukung dengan data yang objektif, akuntabel dan disusun secara rapih dan baik;

4. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah bahwa LPPD Tahun 2015 disampaikan kepada Pemerintah secara berjenjang, yaitu LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan LPPD Kabupaten dan Kota melalui Gubernur **paling lambat tanggal 31 Maret 2015**;
5. Terhadap capaian kinerja provinsi yang berasal dari hasil agregasi capaian kinerja kab/kota agar dikoordinasikan oleh SKPD-SKPD terkait supaya tidak terjadi perbedaan capaian kinerja;
6. Seluruh elemen data kinerja tahun 2015 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing SKPD (tidak bersumber dari BPS kecuali data PDRB) dan disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk didokumentasikan sebagai data pendukung.

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara No. 7 - 8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faxmile (021) 3440783 atau email otda.ekpkd@gmail.com.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Para Anggota Tim Nasional EPPD;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
5. Sdr. Kepala BPKP Pusat;
6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
MENTERI DALAM NEGERI**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8  
JAKARTA PUSAT 10110**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Desember 2014

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Gubernur  
2. Sdr. Bupati  
3. Sdr. Walikota  
di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN NOMOR:

SE.120.04/5043/OTDA

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD kepada masyarakat, yang digunakan sebagai data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikota hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan LPPD dan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk LPPD provinsi, kabupaten dan kota Tahun 2014 agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013, terlampir;
2. Sesuai ketentuan yang berlaku, LPPD Tahun 2014 disampaikan kepada Pemerintah secara berjenjang, yaitu untuk LPPD Provinsi melalui Menteri Dalam Negeri, dan untuk LPPD Kabupaten dan Kota melalui Gubernur paling lambat tanggal 31 Maret 2015;
3. Capaian kinerja dalam LPPD Tahun 2014 harus bersumber pada elemen data kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan bukan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kecuali elemen data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
4. Mengugaskan Kepala Unit Kerja yang menangani penyusunan LPPD untuk mengkonsolidasikan capaian kinerja masing-masing SKPD dan mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja tersebut; dan
5. Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014 disampaikan dalam bentuk compact disc (CD) kepada para gubernur di 34 (tiga puluh empat) provinsi, melalui kantor perwakilan masing-masing provinsi di Jakarta, sebagaimana terlampir.

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No.7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/ faximile: (021) 344 0783 dan email: dit.pkekd@kemendagri.go.id.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

**MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTOR JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
  
**Prof. Dr. H. DIOHERMANSYAH DJOHAN, MA**

Tembusan, disampaikan Kepada Yth,:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di seluruh Indonesia.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Februari 2014

Nomor : 120.04/385/OTDA  
Sifat : SEGERA  
Lampiran :  
Perihal : Pedoman Penyusunan LPPD  
Tahun 2013.

---

Kepada Yth.  
1. Sdr. Gubernur  
2. Sdr. Bupati  
3. Sdr. Walikota  
di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI  
DALAM NEGERI

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD kepada masyarakat, untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikota-hal sebagai berikut :

1. LPPD dan pengisian IKK Tahun 2013 agar disusun dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/7303/OTDA tanggal 26 Desember 2012 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012;
2. Format LPPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) disampaikan kepada Pemerintah tepat waktu sesuai dengan ketentuan atau paling lambat tanggal 31 Maret 2014. Perlu kami sampaikan bahwa "ketepatan waktu" penyampaian LPPD merupakan salah satu IKK dalam LPPD;
3. Seluruh elemen data kinerja Tahun 2013 harus bersumber dari data kinerja masing-masing SKPD (tidak bersumber dari data BPS kecuali data PDRB);
4. Menugaskan Kepala Biro Pemerintahan untuk bertanggung jawab mengkonsolidasikan LPPD dan IKK Tahun 2013 yang disampaikan oleh Bupati dan Walikota untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur;
5. Menugaskan pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada butir 4 (empat) untuk meneliti kelengkapan dokumen LPPD;
6. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang diharapkan menyusun dan menyerahkan LPPD, karena disamping untuk mengetahui kinerja masing-masing, juga akan mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Provinsi.

Apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783 dan email @kemendagri.go.id.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

  
**a.n. MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
**Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.**

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Para Anggota Tim Nasional EPPD;
3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia;
7. Sdr. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Desember 2012

Nomor : 120.04/7303/OTDA  
Sifat : SEGERA  
Lampiran :  
Perihal : Pedoman Penyusunan LPPD  
Tahun 2012.

---

Kepada Yth.  
4. Sdr. Gubernur  
5. Sdr. Bupati  
6. Sdr. Walikota  
di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI  
DALAM NEGERI

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikota-hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2012 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip, baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/1050/OTDA tanggal 15 Februari 2012 perihal penyusunan LPPD Tahun 2014, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya.
2. Namun demikian ada penyesuaian/penyempurnaan beberapa IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan, yang rinciannya sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini.
3. Penyampaian LPPD Tahun 2012 kepada Pemerintah paling lambat tanggal 31 Maret 2013 baik untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu diharapkan ada koordinasi yang lebih baik antara SKPD teknis provinsi dengan SKPD teknis Kabupaten dan Kota.
4. Seluruh elemen data kinerja tahun 2012 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing SKPD (tidak bersumber dari data BPS kecuali data PDRB).
5. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang diharapkan menyusun dan menyerahkan LPPD, karena disamping untuk mengetahui kinerja masing-masing, juga akan mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Provinsi.

Apabila dianggap perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya,

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
  
**Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.**

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Para Anggota Tim Nasional EPPD;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia;
7. Sdr. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat.

**LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012  
TANGGAL 26 DESEMBER 2012**

**PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KOTA  
PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Lampiran II.1 Pengambil Kebijakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan Tentang Kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP		

Lampiran II.3 Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
3	Lingkungan Hidup	24	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional tergolong baik ----- x 100% Jumlah seluruh pasar tradisional	.....%	- Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura
12	Ketenagakerjaan	46	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif ----- x 100% Jumlah pekerja/buruh	.....%	- Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50%
15	KB & KS	54	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan ----- PLKB/PKB	.....%	- Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional.
22	Sosial	68	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun ----- 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun	.....%	- Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosila/kesejahteraan social kabupaten

**LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012**  
**TANGGAL 26 DESEMBER 2012**

**PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KABUPATEN**  
**PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Lampiran III.1 Pengambil Kebijakan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2012)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan Tentang Kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP		

Lampiran III.3 Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)
3	Lingkungan Hidup	24	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional tergolong baik ----- x 100% Jumlah seluruh pasar tradisional	.....%	- Terolong baik sesuai dengan kriteria Adipura
12	Ketenagakerjaan	47	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif ----- x 100% Jumlah pekerja/buruh	.....%	- Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50%
15	KB & KS	55	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan ----- PLKB/PKB	.....%	- Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional.
22	Sosial	69	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun ----- 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun	.....%	- Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosila/kesejahteraan social kabupaten

LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012

TANGGAL 26 DESEMBER 2012

**PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN PROVINSI  
PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Lampiran I.3 Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Lingkungan Hidup	17	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}} \times 100\%$	.....%	- Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura
12	Ketenagakerjaan	36	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100\%$	.....%	- Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50%
15	KB & KS	43	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan PLKB/PKB}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	.....%	- Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Februari 2012

Nomor : 120.04/1050/OTDA  
Sifat : SEGERA  
Lampiran :  
Perihal : Pedoman Penyusunan LPPD  
Tahun 2011.

---

Kepada Yth.  
1. Sdr. Gubernur  
2. Sdr. Bupati  
3. Sdr. Walikota  
di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI  
DALAM NEGERI

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikota-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2014 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2014 perihal penyusunan LPPD Tahun 2013, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya.
2. Namun demikian ada sedikit perubahan teknis perhitungan yang perlu dicermati dalam penyusunan LPPD untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2014, yaitu IKK No. 19 pada lampiran I.2, II.2, dan III.2, semula data diisikan dalam bentuk satuan aset, diubah dalam bentuk satuan Rupiah (Nominal).
3. Untuk IKK No. 2, urusan pilihan pada lampiran I.3 (ekspor hasil perikanan) semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun;
4. Selanjutnya IKK No: 1, urusan pilihan pada lampiran II.3, dan III.3 (produksi perikanan), semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun.

Apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya,

**a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
  
**Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.**

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Para Anggota Tim Nasional EPPD;
3. Sdr. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia;  
dan
7. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Januari 2011

Nomor : 120/313/OTDA  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Penyusunan LPPD Tahun  
2010.

---

Kepada Yth.  
4. Sdr. Gubernur  
5. Sdr. Bupati  
6. Sdr. Walikota  
di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN MENTERI  
DALAM NEGERI

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.120.04/256/OTDA Tanggal 19 Februari 2009 perihal IKK untuk LPPD Tahun 2008 dalam rangka EKPPD, yang digunakan sebagai format LPPD tahun 2008 dan 2009, perlu disempurnakan kembali guna kelancaran teknis operasional penyusunan LPPD tahun 2010 dan IKK-IKK nya.
2. Format IKK yang digunakan untuk LPPD tahun 2010 pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan, sebagai berikut:
  - a. Format IKK untuk Tataran pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan disesuaikan untuk menyajikan elemen-elemen data kinerja.
  - b. Format IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum, disesuaikan terhadap banyak urusan yang diselenggarakan oleh SKPD. Dengan demikian, dibedakan dengan format IKK untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan, dan format IKK untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan.
3. Dalam rangka penyediaan data informasi kinerja yang handal, akurat dan akuntabel, meminta Saudara/i Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melakukan evaluasi pengukuran kinerja mandiri (self assessment) terhadap IKK, sebelum diintegrasikan atau disinkronisasikan ke dalam LPPD tahun 2010.
4. Format LPPD tahun 2010, petunjuk pengisian LPPD, format IKK, petunjuk pengisian IKK sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) serta Program Nasional tahun 2010 terlampir.

Apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783 atau melalui email address: [cbdaerah@yahoo.com](mailto:cbdaerah@yahoo.com). Dan subdit1pkekd@[yahoo.com](mailto:pkekd@yahoo.com)

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

  
**a.n. MENTERI DALAM NEGERI**  
**DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
  
**Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA.**

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Para Anggota Tim Nasional EPPD;
3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia;  
dan
7. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH ( LPPD )**

Provinsi .....

TAHUN 2015

Halaman baru, mengikuti sampul.

Kata Pengantar ..... (maksimum 2 halaman)

Halaman baru, mengikuti Kata

Pengantar. Daftar Isi.

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
( LPPD )**

Kabupaten .....

Provinsi.....

TAHUN 2015

Halaman baru, mengikuti sampul.

Kata Pengantar ..... (maksimum 2 halaman)

Halaman baru, mengikuti Kata Pengantar.

Daftar Isi.

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
( LPPD )**

Kota .....

Provinsi.....

TAHUN 2015

Halaman baru, mengikuti sampul.

Kata Pengantar ..... (maksimum 2 halaman)

Halaman baru, mengikuti Kata Pengantar.

Daftar Isi.

## **BAB I PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum** (dijelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)

### **B. Gambaran Umum Daerah**

1. **Kondisi Geografis Daerah**; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. **Gambaran Umum Demografis**; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
3. **Kondisi Ekonomi** ;
  - a. Potensi Unggulan Daerah
  - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

## **BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD).**

**A. Visi dan Misi**

**B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah**

**C. Prioritas Daerah**

## **BAB III URUSAN DESENTRALISASI**

**A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.**

**1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib.**

Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan wajib.

**2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan**

Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan pilihan.

**3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.**

Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur, susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan daerah.

## **B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan**

1. Program dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan dan Solusi
9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

## **C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan**

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
6. Alokasi Realisasi Anggaran
7. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan dan Solusi
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

## **D. Indikator kinerja kunci**

### **1. Tataran Pengambil Kebijakan.**

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk pemerintah provinsi menggunakan

Format Lampiran I.1. pemerintah kota Lampiran II.1, dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 1. (terlampir)

## **2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum.**

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.2, pemerintah kota Lampiran II.2, dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 2. (terlampir)

## **3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.**

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.3, pemerintah kota Lampiran II.3 dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 3 (terlampir)

## **BAB IV TUGAS PEMBANTUAN**

### **A. Tugas Pembantuan yang Diterima**

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program dan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan dan Solusi
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

## **B. Tugas Pembantuan yang Diberikan**

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

## **BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

### **A. Kerjasama Antar Daerah**

1. Daerah yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (*Output*) dari Kerjasama
10. Permasalahan dan Solusi
11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

### **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama

9. Hasil (Output) dari Kerjasama
10. Permasalahan dan Solusi
11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

### **C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal yang Terlibat
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

### **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/ Kota).
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

#### **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

#### **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
6. Sumber dan Jumlah Anggaran

### **BAB VI PENUTUP**

Manual ini merupakan alat panduan bagi Pemerintah Daerah, khususnya para penyusun LPPD agar penyusunan LPPD Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota lebih terstruktur dan dapat menyajikan sebuah data yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja Pemerintahan Daerah.

# PETUNJUK PENGISIAN IKK



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8  
JAKARTA PUSAT 10110

# BAB I

## PENGISIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Format IKK yang akan dikerjakan, harap dibaca dengan teliti dan seksama. Dari cara pengisiannya, IKK dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

### 1. IKK Yang Menggunakan Rumus Persamaan;

Capaian kinerja IKK yang menggunakan rumus persamaan dengan satuan “persentase” dan “rasio”, dll.

### 2. IKK Yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan;

Capaian kinerja yang tidak menggunakan rumus persamaan dengan pernyataan “Ada atau tidak ada” , “tepat atau tidak tepat” ; “sesuai atau tidak sesuai”, jumlah, lama waktu, dll.

#### 1.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.

1. Perhatikan, baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Apa dan bagaimana rumus persamaan IKK diuraikan. Pastikan jawabannya.
2. Tulis data dan informasi (angka) dari masing-masing elemen persamaan, mengikuti tulisan rumus dan hitung **pada kolom 6** (Rumus/Perhitungan).
3. Tulis elemen-elemen data dan informasi kinerja pada kolom “Jenis data”.
4. Tulis hasil perhitungan capaian kinerja, pada kolom “Capaian Kinerja”.
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”

**Contoh 1** : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber IMB.

$$\text{Rasio Rumah ber – IMB} = \frac{\text{Jumlah Rumah ber IMB}}{\text{Jumlah Rumah seluruhnya}} \times 100 = - \%$$

Rasio Rumah ber-IMB = ..... % adalah capaian kinerja yang diminta/diisi.

#### Elemen data

Contoh:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Rumah ber IMB} &= 20.000 \text{ unit} \\ \text{Jumlah Rumah seluruhnya} &= 100.000 \text{ unit} \end{aligned}$$

Catatan: Elemen data ini diperoleh dari sumber SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya.

$$\text{Rasio Rumah ber – IMB} = \frac{20.000}{100.000} \times 100 = 20 \%$$

Berdasarkan elemen data yang diperoleh, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan, maka diperoleh hasil perhitungan IKK- Rasio Rumah ber- IMB = 20%.

**Contoh 1 :** Lampiran IKK no 2 : Rasio Rumah Ber-IMB

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket.
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Rasio Rumah ber IMB	$\frac{\text{Jumlah rumah ber IMB}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	Jumlah Rumah ber IMB = <b>20.000 unit</b> Jumlah Rumah seluruhnya = <b>100.000 unit</b>	<b>20%</b> $(\frac{20.000}{10.000} \times 100\% = 20\%)$	

**1.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN**

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/ Pernyataan yang diminta.
2. Tulis pernyataan hasil perumusan pada kolom "Rumus/Perhitungan".
3. Tulis elemen data dan informasi dukungan pernyataan pada kolom "Jenis data".
4. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

**Contoh 2:** Hasil Pengisian IKK Nomor 9: Ketepatan waktu penyampaian.

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data Tahun 2013*)	Capaian Kinerja	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti pengiriman : LPPD tahun 2013 disampaikan pada tanggal ----- sesuai dengan bukti copy surat tanda terima nomor -----	<b>TEPAT</b>	

\*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian informasi kapan diserahkan.

**Contoh 3:** Hasil Pengisian IKK Nomor 11 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya.

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data Tahun 2013*)	Capaian Kinerja	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND  <b>3 Urusan</b>	Urusan yang sudah ada SPM nya sesuai dengan Perkada nomor .... tahun .... ttg... sebanyak 3 urusan, sbb : 1) Urusan Pendidikan; 2) Urusan Kesehatan; dan 3) Urusan Kependudukan dan Capil	<b>3 urusan</b>	

\*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian urusan apa yang dilaksanakan.

## BAB II

### TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

IKK Tataran Pengambil Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.1. Lampiran II.1. dan Lampiran III.1 Format IKK untuk provinsi, kabupaten dan kota, dengan judul “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2015.

Contoh :

Lampiran III. 1 : Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut.

#### LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

##### TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

Kabupaten: -----

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Perhitunga	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

#### 2.1. PENJELASAN FORMAT

Format IKK Untuk Kabupaten, “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2015 (Lampiran III.1), terdiri dari beberapa baris/lajur dan kolom.

Masing-masing baris menunjukkan aspek, focus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom-kolom atau sel isian. Format terdiri dari 9 kolom.

1. Kolom (1), (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek, fokus dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9).
3. Kolom (6) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8).
4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor --- tahun --- tentang ----. Uraian elemen-elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaan.

5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan berdasarkan perhitungan pada kolom (6).
6. Kolom (9) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan.

## **2.2. PETUNJUK UMUM PENGISIAN**

1. Format ini terdiri dari aspek-aspek, masing-masing aspek dibagi ke dalam focus, dan focus terdiri IKK-IKK. Keseluruhan Tataran Pengambil Kebijakan untuk Kabupaten sebanyak 43 IKK.
2. Data dan informasi capaian kinerja IKK, bersumber dari dan diisi SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. IKK yang data dan informasi capaian kinerjanya bersumber dari beberapa SKPD sesuai dengan tupoksinya, pengisian dilakukan secara koordinatif.
4. Hasil pengisian format/IKK, agar disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD, untuk diolah menjadi LPPD.

## **2.3. PETUNJUK PENGISIAN**

1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK tersebut menggunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan.
2. IKK yang Menggunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang Menggunakan Rumus Persamaan.
3. IKK yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang Tidak Menggunakan Rumus Persamaan.

### **2.3.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN**

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta.
2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung, pada kolom "Rumus/Perhitungan". Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya.
3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom "Jenis data".
4. Tulis hasil perhitungan pada kolom "Capaian Kinerja".
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

**Contoh 4:** Hasil Pengisian IKK nomor 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket.
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah Belanja untuk pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah Belanja APBD x 100%=	Realisasi Belanja Pendidikan = Rp. 10 M Realisasi Belanja Kesehatan = Rp. 11 M Jumlah belanja = Rp. 21 M Jumlah Belanja APBD = Rp. 100 M	<b>21 %</b> $(\frac{21M}{100 M} \times 100 M = 21\%)$	

### 2.3.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta.
2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom "Rumus/Perhitungan".
3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom "Capaian Kinerja".
4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

**Contoh 5 :** Hasil Pengisian IKK nomor 21 Sistem Informasi Kepegawaian.

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidaknya data base kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten -----	<b>Ada</b>	

## BAB 3

# TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.2. (provinsi), Lampiran II.2. (kabupaten) dan Lampiran III.2. (kota).

**Contoh:** Lampiran III. 2  
Format Isian Kabupaten, sebagai berikut :

### LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

#### TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

**KABUPATEN:** .....

**NAMA SKPD:** (Sebutkan nama SKPD).

**URUSAN YANG DILAKSANAKAN:** (sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs).

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Format IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, terdiri dari beberapa bentuk yaitu untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan dan untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan.

*Contoh tabel di atas adalah untuk **SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan.***

### 3.1. PENJELASAN FORMAT

Format IKK terdiri dari beberapa kolom dan baris/lajur. Masing-masing baris menunjukkan aspek, fokus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom-kolom isian. Format isian terdiri dari 21 IKK pada baris dan 9 kolom.

1. Kolom (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) adalah kolom tentang aspek, fokus, IKK dan rumus. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
2. Kolom isian adalah kolom (7), (8), dan (9).
3. Kolom (6): Rumus/Perhitungan. Pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8).

4. Kolom (7) Jenis data, pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor --- tahun --- tentang ---. Uraian elemen-elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaan.
5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan atau pernyataan, berdasarkan perhitungan pada kolom (6).
6. Kolom (9) merupakan informasi tambahan penjelasan, jika diperlukan.

### 3.2. PETUNJUK UMUM

1. Format IKK pada 8 Aspek Administrasi Umum, diisi oleh seluruh SKPD yang ada.
2. SKPD ada yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan saja, atau 1 sub bidang urusan, atau yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan.
3. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut:  
 KABUPATEN: diisi sesuai dengan nama kabupaten  
 NAMA SKPD: diisi dengan nama SKPD  
 URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN: tulis urusan yang dilaksanakan oleh SKPD.

**Contoh: Hasil Pengisian**

KABUPATEN: BANTUL

NAMA SKPD: DINAS KESEHATAN

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: KESEHATAN

4. Format ini diisi oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Karena yang dinilai adalah kinerja SKPD selaku pelaksana urusan wajib atau pilihan, sehingga data dan informasi kinerja yang diminta adalah hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. SKPD wajib mengisi capaian kinerja.
5. Sebelum pengisian IKK harap memperhatikan jenis IKK yang akan diisi. Apakah masuk IKK yang menggunakan rumus persamaan atau IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan.
6. Setelah selesai diisi, diminta agar Kepala atau Pimpinan SKPD yang bersangkutan melakukan reviu terhadap kebenaran hasil pengisian untuk persetujuan. SKPD diminta mendokumentasikan data informasi yang diserahkan.
7. Hasil pengisian diserahkan secepatnya kepada bagian tata pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD. Perlu diketahui bahwa penyusun LPPD masih memerlukan waktu klarifikasi, penggabungan dan lainnya ke dalam LPPD.

8. Kontrol bagi penyusun LPPD: jumlah format isian Lampiran III.2 Tataran Pelaksana Kebijakan yang terdiri dari 8 Aspek Administrasi Umum harus sama dengan jumlah SKPD dan Bagian yang menangani urusan yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah.

**9. BAGI SKPD YANG MELAKSANAKAN LEBIH DARI 1 URUSAN.**

SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan, maka Format isian dapat dimodifikasi dengan menambah/menyisip/insert kolom baru pada masing-masing kolom (jenis data) dan kolom (capaian kinerja) sesuai dengan banyak urusan yang diselenggarakan. Untuk SKPD yang menyelenggarakan 2 urusan dapat dilihat format hasil modifikasinya, sedangkan untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih 2 urusan agar dimodifikasi sendiri.

Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut :

- KABUPATEN : diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten
- Nama SKPD : diisi dengan nama SKPD
- URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
- 1) Urusan -----
- 2) Urusan ----- dst, bila masih ada.
- 3) Urusan -----

Contoh hasil modifikasi

**LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN**

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

KABUPATEN: TANGERANG

NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

- 1) PERINDUSTRIAN,
- 2) PERDAGANGAN

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Perindustrian	Perdagangan	Perindustrian	Perdagangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)

### 3.3. PETUNJUK PENGISIAN:

1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK menggunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan.
2. IKK yang **Menggunakan Rumus Persamaan**, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang menggunakan rumus persamaan.
3. IKK yang **Tidak Menggunakan Rumus Persamaan**, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang **Tidak Menggunakan Rumus Persamaan**.

#### 3.3.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data capaian kinerja yang diminta.
2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya.
3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom "Jenis data".
4. Tulis proses dan hasil perhitungannya pada kolom "Capaian Kinerja".
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

#### Contoh 6: (contoh pengisian 1 SKPD melaksanakan 1 urusan):

Hasil Pengisian IKK nomor 13, Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD.

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Ket
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total Belanja APBD x 100%	Anggaran belanja SKPD = Rp. 2 M Total APBD = Rp. 350 M	<b>0,571%</b> $(\frac{2 \text{ M}}{350 \text{ M}} \times 100\% = 0,571\%)$	Unit Keuangan

#### Contoh 7 : Pengisian IKK nomor 13.

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD.

No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket.
			Perindustrian	Perdagangan	Perindustrian	Perdagangan	
(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Anggaran SKPD = Rp. 2M Total APBD = Rp. 350 M	Anggaran SKPD = Rp. 1M Total APBD = Rp. 350 M	<b>0,571%</b> $(\frac{2 \text{ M}}{350 \text{ M}} \times 100\% = 0,571\%)$	<b>0,571%</b> $(\frac{2 \text{ M}}{350 \text{ M}} \times 100\% = 0,571\%)$	Dispenda

### 3.3.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta.
2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom "Rumus/Perhitungan".
3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom "Capaian Kinerja".
4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

**Contoh 8:** IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SOP ..... buah	SOP : Perijinan	1	

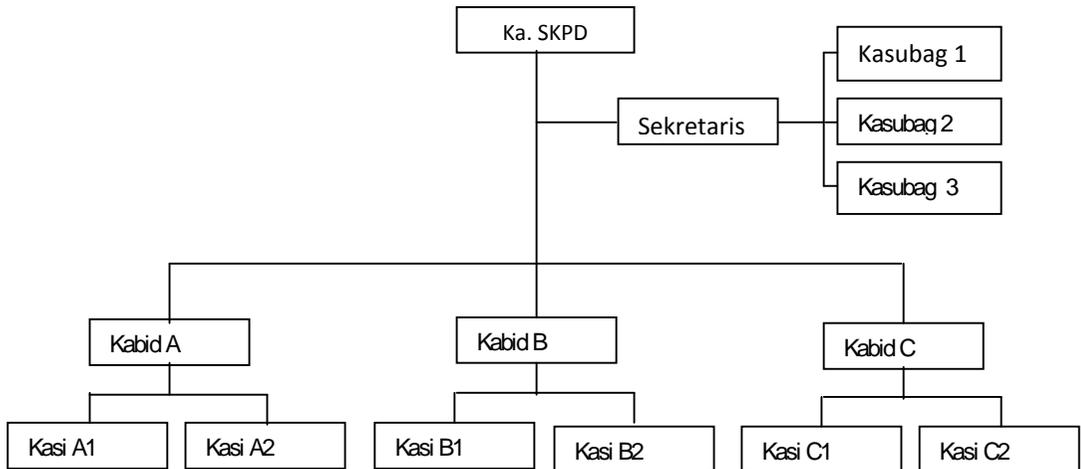
**Contoh 8:** IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
			Perindustri an	perdagangan	Perindustri an	perdagangan	
(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
13	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah SOP ..... .buah	SOP : 1. Ijin Industri	SOP : 1. Ijin Usaha Perdagangan	1	1	

### 3.4. PENJELASAN KHUSUS.

1. Untuk membantu penyusun LPPD, perlu penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi, kaitannya dengan urusan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat pada dokumen perencanaan dan penganggaran, APBD serta Laporan Keuangan Daerah (*unaudited*).
2. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan, melakukan pemilahan atas urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - a. SKPD harus memilih dan memisahkan jabatan-jabatan yang menangani langsung masing-masing urusan, sehingga didapatkan secara pasti, berapa jumlah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang menangani masing-masing urusan. Untuk Kepala SKPD, Pejabat Struktural di bidang Kesekretariatan dan bidang lain yang sulit dipisahkan dimasukkan ke dalam urusan yang dominan. Data informasi tentang jabatan tersebut lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2015 (*updated*). Nama, jabatan, kepangkatan, pendidikan terakhir, pendidikan dan pelatihan struktural, dan lainnya sesuai dengan perumusan IKK-nya.

- b. Contoh: Bagaimana menghitung struktur jabatan yang terisi.  
Misalnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menangani 2 urusan.



Berdasarkan struktur organisasi di atas, dimisalkan urusan bidang perdagangan lebih dominan daripada urusan perindustrian, maka untuk pembagian pejabat struktural dapat diuraikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Perdagangan				Industri	
Kepala SKPD					
Sekretaris					
Kasubag 1	Kasubag 2	Kasubag 3			
Kabid A		Kabid B		Kabid C	
Kasi A1	Kasi A2	Kasi B1	Kasi B2	Kasi C1	Kasi C2

Jumlah Pejabat yang menangani perdagangan, sebanyak 11 pejabat, dan industri sebanyak 3 Pejabat, sebagai berikut :

Pejabat	Perdagangan	Industri
Kepala SKPD	1	-
Sekretaris	1	-
Kabid	2	1
Kasubag/Kasi	7	2
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

**Contoh 10 :** IKK nomor 7 : Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan.

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
			Perindustrian	Perdagangan	Perindustrian	perdagangan	
(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim = 3 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim = 11 orang</li> </ul>	100% (3/3 x 100 = 100%)	100% (11/11 x 100 = 100%)	
			Jumlah pejabat SKPD yang ada = 3 orang	Jumlah pejabat SKPD yang ada = 11 orang			

- c. SKPD harus memilah dan memisahkan anggaran belanja dan atau realisasi belanja untuk masing- masing urusan yang dilaksanakan, sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk masing-masing urusan yang menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.
- d. Dalam hal inventarisasi barang dan asset, bilamana SKPD tidak memilah dan memisahkan menurut urusan maka dilakukan dengan mencantumkan pada salah satu kolom isian urusan yang tersedia saja.

**Contoh 11:** IKK nomor 19: Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD

No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Jenis Data		Capaian Kinerja		Ket
			Perindustrian	perdagangan	Perindustrian	perdagangan	
(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
19	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Jumlah asset yang tidak digunakan = Rp. 0,-	Tidak ada pemisahan asset SKPD	0% (0/10 M x 100% = 0)	Tidak ada pemisahan asset SKPD	
			Total Asset yang dikuasai SKPD = Rp. 10.M				

## BAB 4

# TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

## ASPEK CAPAIAN SPM

IKK untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan judul format IKK untuk provinsi (lampiran I.3), kabupaten (lampiran II.3 dan kota (lampiran III.3) yaitu: "Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan".

Contoh. Lampiran III. 3: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut:

### LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
KABUPATEN: .....**

No	URUSAN	No	IKK	Rumus/ Perhitungan	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
1.	Pendidikan	1				
		2				
		3				
		4				
2.	Dst .....					
26.						
<b>URUSAN PILIHAN</b>						
1.		1				
		2				
		3				
2.						
8.						

**Catatan:** Urusan Otonomi Daerah mencakup: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

Format IKK terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Masing-masing urusan wajib dan pilihan terdiri dari beberapa IKK. IKK untuk masing-masing urusan diisi oleh SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

#### **4.1. PENJELASAN FORMAT.**

1. Format dibagi menurut urusan yaitu URUSAN WAJIB dan URUSAN PILIHAN.
2. Masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan, dibagi dengan individu urusan.
3. Urusan wajib ada sebanyak 26 urusan dan masing-masing diikuti dengan IKK.
4. Urusan pilihan ada sebanyak 8 urusan dan masing-masing diikuti dengan IKK.
5. Bagi pemerintah daerah yang tidak menyelenggarakan satu atau beberapa dari urusan pilihan tertentu tulis BUP (Bukan Urusan Pilihan). Misalnya: Pemerintah Daerah tertentu tidak menyelenggarakan Urusan Transmigrasi, maka Urusan Transmigrasi ditulis BUP.
6. Kolom (1), (2), dan (3) adalah kolom tentang urusan dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
7. Kolom isian adalah kolom (5), (6), dan (7).
8. Kolom (5) Rumus/Perhitungan. Kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (6).
9. Kolom (6) Capaian Kinerja. Kolom ini diisi dengan capaian kinerja berdasarkan hasil perhitungan dari kolom (5); dan
10. Kolom (7) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan.

#### **4.2. PETUNJUK UMUM**

1. SKPD, hanya mengisi IKK urusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. SKPD yang menyelenggarakan beberapa urusan, mengisi IKK-nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk satu urusan atau IKK yang diselenggarakan oleh beberapa SKPD, melakukan koordinasi pengisian IKK-nya. Catatan: IKK telah disepakati dengan lintas sektor.
3. Setelah diisi oleh SKPD yang bersangkutan, hasil pengisian diserahkan kembali ke Bagian Pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD.
4. Setelah menerima isian, SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD melakukan klarifikasi dan menyusun ke dalam LPPD.
5. SKPD diminta untuk mendokumentasikan data informasi yang diserahkan, sebagai bukti dan akuntabilitas kinerja bilamana ada klarifikasi dan validasi kemudian.

### 4.3. PETUNJUK PENGISIAN

1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK yang **menggunakan rumus persamaan**, atau yang **tidak menggunakan rumus persamaan**.
2. IKK yang **menggunakan rumus persamaan**, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK yang **menggunakan rumus persamaan**.
3. IKK yang **tidak menggunakan rumus persamaan**, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK **tidak menggunakan rumus persamaan**.

#### 4.3.1. IKK YANG MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN

- 1) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan, data capaian kinerja yang diminta.
- 2) Tulis elemen-elemen data informasi IKK mengikuti rumus persamaan pada kolom "Rumus/Perhitungan". Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya.
- 3) Masukkan data angka hasil perhitungan pada kolom "Capaian Kinerja".
- 4) Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

**Contoh 12:** Pengisian IKK nomor 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	URUSAN	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pendidikan	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jml Siswa pd jg TK/RA/PA}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100\%$	<b>2%</b> (50/2500 x 100% = 2%)	

#### 4.3.2. IKK YANG TIDAK MENGGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN

- 1) Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan, data informasi capaian kinerja yang diminta.
- 2) Tuliskan pernyataan hasil mengikuti rumus perhitungan pada kolom "Rumus/Perhitungan".
- 3) Tulis pernyataan kinerja pada kolom "Capaian Kinerja".
- 4) Tuliskan informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom "Keterangan".

**Contoh 13:** Pengisian IKK nomor 17. Website

No	URUSAN	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Komunikasi dan Informasi	57	Website milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak Ada website milik pemerintah kabupaten....	Ada	

**Contoh 14 :** Pengisian IKK Urusan Pilihan yang tidak dilaksanakan “BUP

No	URUSAN	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Capaian Kinerja	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Transmigrasi	15	Transmigrasi swakarsa	$\frac{\text{Jml trans. swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\% =$	BUP	

**4.4. PETUNJUK KHUSUS:**

1. Bagi IKK untuk provinsi yang capaian kinerja merupakan rata-rata dari capaian kinerja kabupaten dan kota di wilayahnya, diminta agar diantisipasi dengan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten dan kota.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan, batas waktu penyampaian LPPD provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dari aspek waktu penyampaian LPPD, tidak ada perbedaan antara provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diminta agar data informasi capaian kinerja kabupaten dan kota dapat diinformasikan kepada pemerintah provinsi secepatnya, agar penyusunan LPPD provinsi, tidak mengalami keterlambatan.
3. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyerahkan LPPD Tahun 2015 secara lengkap kepada Gubernur, dan pemerintah provinsi yang menerima, menyerahkan tanda terima (resmi) kepada pemerintah kabupaten dan kota. Yang dimaksud dengan lengkap adalah LPPD dan lampiran (Isian IKK) dalam bentuk hard copy dan soft copy.
4. Pemerintah provinsi dihimbau agar segera mengirim “Softcopy-LPPD kabupaten dan kota yang lengkap” kepada Ditjen OTDA, Direktorat PKEKD melalui alamat email: ***dit.pkekd@kemendagri.go.id***.

SELAMAT BEKERJA

# PROGRAM NASIONAL



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 7-8  
JAKARTA PUSAT 10110

## PROGRAM NASIONAL BERDASARKAN RKP TAHUN 2010

### A. URUSAN WAJIB

#### 1. PENDIDIKAN

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini		V
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		V
3	Program Pendidikan Menengah	V	V
4	Program Pendidikan Tinggi	V	
5	Program Pendidikan Non Formal	V	V
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	V	
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	V	V
8	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	V	
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>

#### 2. KESEHATAN

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	V	V
2	Program Lingkungan Sehat	V	V
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	V	V
4	Program Upaya Kesehatan Perorangan	V	V
5	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	V	V
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	V	V
7	Program Sumber Daya Kesehatan	V	V
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	V	V
9	Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat	V	V
10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	V	V
11	Program Pengawasan Obat dan Makanan	V	V
12	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	V	V
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

### 3. LINGKUNGAN HIDUP

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	V	V
2	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	V	V
	Jumlah	4	3

### 4. Pekerjaan Umum

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya	V	V
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	V	V
3	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	V	V
4	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	V	V
5	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	V	V
6	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	V	V
7	Program Pembangunan Ekonomi Lokal	V	V
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	V	V
	Jumlah	8	8

### 5. Penataan Ruang

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Penataan Ruang	V	V
	Jumlah	1	1

## 6. Perencanaan Pembangunan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
	Tidak Ada		
	Jumlah		

## 7. Perumahan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Perumahan	V	V
2	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	V	V
3	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	V	V
	Jumlah	<b>3</b>	<b>3</b>

## 8. Kepemudaan & Olah Raga

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	V	V
2	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	V	V
3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	V	V
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	V	V
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	V	
	Jumlah	<b>5</b>	<b>4</b>

## 9. Penanaman Modal

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	V	V
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	V	V
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	V	V
	Jumlah	<b>3</b>	<b>3</b>

#### 10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM	V	V
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	V	V
3	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	V	V
4	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	V	V
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	V	V
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

#### 11. Kependudukan dan Catatan Sipil

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	V	V
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan	V	V
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

#### 12. Ketenagakerjaan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	V	V
2	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	V	V
3	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	V	V
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### 13. Ketahanan Pangan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	V	V
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### 14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	V	V
2	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	V	V
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	V	V
	Jumlah	<b>3</b>	<b>3</b>

#### 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Keluarga Berencana	V	V
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	V	V
3	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	V	V
4	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	V	V
	Jumlah	<b>4</b>	<b>4</b>

#### 16. Perhubungan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	V	V
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	V	V
3	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	V	V
4	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ:	V	V
5	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyebrangan	V	V
6	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	V	V
	Jumlah	<b>6</b>	<b>6</b>

**17. Komunikasi dan Informatika**

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	V	V
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi Publik	V	V
	Jumlah	<b>2</b>	<b>2</b>

**18. Pertanahan**

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1			

**19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	V	V
2	Program Pemeliharaan Kamtibmas	V	V
	Jumlah	<b>2</b>	<b>2</b>

**20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	V	V
2	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	V	V
3	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah	V	V
4.	Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah	V	
	Jumlah	<b>4</b>	<b>3</b>

## 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	V	V
2	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	V	V
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan		V
	Jumlah	2	3

## 22. Sosial

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	V	V
2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	V	V
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	V	V
4	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	V	V
5	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	V	V
	Jumlah	5	5

## 23. Budaya

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	V	V
2	Program Pengembangan Nilai Budaya	V	V
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	V	V
4	Program Pengembangan Kemitraan	V	V
	Jumlah	4	4

## 24. Statistik

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik	V	V
	Jumlah	1	1

## 25. Kearsipan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
	-		
	Jumlah		

## 26. Perpustakaan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	V	V
2	Pengembangan Nilai Budaya	V	V
	Jumlah	2	2

## B. URUSAN PILIHAN

### 1. Kelautan dan Perikanan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	V	V
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	V	V
	Jumlah	2	2

### 2. Pertanian

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Agribisnis	V	V
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	V	V
	Jumlah	2	2

### 3. Kehutanan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pemanfaatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.	V	V
2	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	V	V
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	V	
	Jumlah	<b>4</b>	<b>3</b>

### 4. Energi dan Sumber Daya Mineral

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	V	V
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	V	V
3	Program Peningkatan aksesibilitas Pemda dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi .	V	V
	Jumlah	<b>3</b>	<b>3</b>

### 5. Pariwisata

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	V	V
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	V	V
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	V	V
	Jumlah	<b>3</b>	<b>3</b>

## 6. Industri

No	Program Nasional	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	V	V
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	V	V
3	Program Penataan Struktur Industri	V	
	Jumlah	3	2

## 7. Perdagangan

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	V	V
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	V	V
3	Program Persaingan Usaha		V
4	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	V	V
	Jumlah	4	4

## 8. Transmigrasi

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal		V
	Jumlah		1

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

PROVINSI: -----

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	Kab/Kota memiliki perda IMB, sebanyak -- --- daerah Kab/kota usia di atas 3 tahun dan Kepala Daerah terpilih.	..... %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau PTSP
		Peraturan ttg kependudukan	2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD x 100 %	Kab/Kota yang memiliki perda kependudukan , sebanyak -----daerah. Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- daerah.	..... %	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2015 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2015= ----- orang Jumlah penduduk pada akhir tahun 2015 = -----orang	... per 50.000 penduduk	Sumber data dari BKD
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada Pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2015	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016.	Tepat / Tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otda
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak ada penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2015, disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016 - Laporan Kinerja tahun 2015. disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- --- tanggal ----- 2016	- Tepat/ tidak  - Tepat/ tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
	Implementasi Standar Minimal (SPM)	6	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%  Rata-rata= .....urusan = ..... Kab/kota	1) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 2) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 3) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 4) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 5) <u>Dst ..</u> Jumlah = ---- urusan  Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ---- Kab/Kot.	..... urusan	SPM Kesehatan SPM Sosial SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup SPM BKKBN SPM Pemberdayaan Perempuan
	Hubungan antar daerah	7	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU pemprov dengan daerah lain ( yang masih berlaku tahun 2015)	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2015, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst---	..... MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	8	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi <u>Jumlah prioritas pembangunan nasional</u> <sup>1</sup>	- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD), sebanyak ----- program.  - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), sebanyak ----- program	..... %	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan
	Kewenangan	9	Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2017) X 100%	Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%  Rata-rata= .....urusan = ..... Kab/kota	1) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 2) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 3) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 4) Kab/Kota ----- = ---- urusan. 5) <u>Dst ..</u> Jumlah = ---- urusan  Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ---- Kab/Kot.	..... %	

<sup>1</sup> Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata PP Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
	Keuangan	10	Waktu penetapan perda APBD 2015	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan perda APBD 2015 (31 Desember 2014)	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -- ----APBD 2015	Tepat/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD. <b>Tidak tepat</b> , apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2014.
		11	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -- ----- ( pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
		12	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) Urusan Kesehatan Rp. ---- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. ---- 4) Urusan PU Rp. ---- 5) Urusan Sosial Rp. ---- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ---- 7) Urusan Koperasi Rp. ---- 8) Urusan Satpol PP Rp. ---- 9) <u>Urusan Kependudukan &amp; Capil</u> Rp. --- = Total Belanja pelayanan dasar Rp. ----  Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
		13	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan/ pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) <u>Urusan Kesehatan</u> Rp. ---- Total Belanja Pend & Kes Rp. ----  Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Data Diambil dari : - Dinas Pendidikan - SKPD lain yang melaksanakan urusan pendidikan
	Pelayanan Publik	14	Keberadaan Perda	Ada atau tidak ada standar	Apabila ADA:	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
				tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> <sup>2</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	pelayanan publik	Sebutkan dasar hukum, Perda Nomor ----- Tahun----- tentang ----- (standar pelayanan publik')		Hukum
		Kepegawaian	15	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Provinsi tahun 2015 sebanyak ----- orang.  Jumlah penduduk provinsi tahun 2015 sebanyak ----- orang-	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD  Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
			16	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak ada database kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD
		Kelembagaan	17	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb: 1) Biro (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) <u>Lembaga Teknis lainnya</u> = ---- unit Jumlah SKPD = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	18	Perda yang ditetapkan	Jumlah perda yang ditetapkan dalam tahun 2015	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2015, sebanyak ----- Perda ( Daftar Perda terlampir)	..... Perda	Sumber data dari Bagian Hukum

<sup>2</sup> Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	19	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah Raperda yang diusulkan tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, sebanyak -----RAPERDA.</li> <li>- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, sebanyak ----- PERDA.</li> </ul>	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti	20	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2015 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2015, sebanyak-----keputusan.</li> <li>- Keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPR dalam tahun 2015, sebanyak----- keputusan.</li> </ul>	.....%	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)	21	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah KepGub dalam tahun 2015 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Gubernur dalam tahun 2015, sebanyak ----- keputusan.</li> <li>- Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan.</li> </ul>	.... %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah PerGub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah PerGub dalam tahun 2015 X 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Pergub.</li> <li>- Peraturan Gubernur dalam tahun 2015, sebanyak ----- Pergub.</li> </ul>	.... %	Sumber data dari Bagian Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	23	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi X 100%	<p>Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perda Nomor ----- Tahun 2015 tentang -----</li> <li>2) Perda Nomor ----- Tahun 2015 tentang -----</li> <li>3) Dst.</li> </ol> <p>Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ----- Perda.</p>	.... %	Sumber data dari Bagian hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA atau PerGub tentang konsultasi publik	24	Keberadaan PERDA atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada PERDA atau PerGub	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Pergub Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik	25	Adanya media informasi PEMDA yang dapat diakses oleh publik (website, kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi. yang ditetapkan dengan PerGub	Apabila Ada, - Sebutkan nama media informasinya -- ----dan. - Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan X 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. ----- - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	27	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU X 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp----- - DAU Tahun 2015, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Alokasi Belanja pada APBD	28	Belanja Langsung terhadap total APBD	Jumlah belanja langsung dibagi APBD X 100%	Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp----- Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD X 100%	- PAD APBD Tahun 2015, sebesar Rp --- -- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015 (Realisasi), sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	30	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014, dengan opini: -----  - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: -----	Opini tahun 2014 = ----  Opini tahun 2015= -----	Opini, WTP/ <i>unqualified opinion</i> ); WDP/ <i>qualified opinion</i> ); TMP/ <i>disclaimer opinion</i> ), atau TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i> ).
		Besaran SILPA	31	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan X 100%	- SILPA Tahun 2015, sebesar Rp ----  - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ----	..... %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Realisasi Pendapatan	32	Rasio realisasi PAD thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp ---- - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. ----	.... %	Sumber data dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD)
		Realisasi belanja	33	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2015, sebesar Rp -----  - Total Belanja dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Pembilang : Sumber data dari Laporan Realisasi Belanja/LRA  Penyebut : Sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	34	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015	- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak ----- temuan.  - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015, sebanyak ---- temuan.	..... %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	35	Rasio realisasi PAD 2015 terhadap <u>potensi PAD</u> <sup>3</sup>	Jumlah realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp. ----  - Potensi PAD pada APBD Tahun 2015, sebesar Rp-----	.... %	Sumber data dari BPKAD
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	36	Peningkatan PAD	Kenaikan atau penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu X 100%	- Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. ----	.... %	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam

<sup>3</sup> Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		(PAD)			atau (PAD 2015- PAD 2014) : PAD 2014 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp.-----		RPJMD)
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	37	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.	Jumlah penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015	Penghargaan yang diterima, sebanyak ---- - yang terdiri dari 1) -----. 2) -----. 3) -----. 4) Dst -----.	.... Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	38	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada E- procurement	Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses e- procurement
		Daya saing daerah	39	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2015	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2015, sebanyak ----- ijin dengan total nilai investasi sebesar Rp -----	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

PROVINSI : .....

NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak -- --- program	..... %	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Ada -----SOP / Tidak Ada :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	..... %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak --- - Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	.....%	Sumber data BKD/DUK SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD , sebanyak ----- personil - Total PNS Provinsi, sebanyak -- ----- personil	.....	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ---- -----org.	..... %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- ----- jbt.	..... %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. ....	..... jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	..... %	Sumber data SKPD Mengacu dokumen RKPDP tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	..... %	Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.	..... %	Sumber data dari dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp -----	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2015 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Tidak Ada/ Ada sebanyak ---- --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp ----- . - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	Jumlah sebanyak ----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

Provinsi : .....

NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan -----

2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPKN) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program	..... %	..... %	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 5. SOP ttg ----- 6. SOP ttg ----- 7. SOP ttg ----- 8. Dst -----	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	..... %	..... %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak ----- - Jabatan yang ada, sebanyak -----	- Jabatan yang terisi sebanyak ----- - Jabatan yang ada, sebanyak -----	..... %	..... %	Sumber data BKD/DUK SKPD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --- -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak ----- personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak ----- personil - Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil	-----	-----	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.	----- %	----- %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- - org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	----- %	----- %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. ....	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. ....	..... jenis dokumen	..... jenis dokumen	Sumber data yang BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ----- -- program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak --- ----	- Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ---- ---- program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak - -----	..... %	..... %	Sumber data SKPD Mengacu dokumen RPKD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	..... %	..... %	Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ----- program.	..... %	..... %	Sumber data dari dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ---- - Total Belanja APBD, sebesar Rp -----	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ---- - Total Belanja APBD, sebesar Rp -----	..... %	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2015 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	..... %	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	- - Total belanja pemeliharaan SKPD,	- - Total belanja pemeliharaan SKPD,	..... %	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				dan jasa	SKPD) x 100%	sebesar Rp. -----  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. -----	sebesar Rp. -----  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .... 2. .... 3. ....	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .... 2. .... 3. ....	Tidak Ada/  Ada sebanyak -- ----- jenis :	Tidak Ada/  Ada sebanyak -- ----- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, Rp. ....  - Asset yang dikuasai SKPD, Rp.....	- Asset yang tidak digunakan,Rp -----.  - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. ....	..... %	..... %	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015.**

PROVINSI -----

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>1</b>	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Sosial
		<b>2</b>	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Sosial
		<b>3</b>	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pendidikan/Dinas Sosial
		<b>4</b>	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SD/MI}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		<b>5</b>	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SMP/MTS}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		<b>6</b>	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pendidikan
		<b>7</b>	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan		Peta penjaminan mutu pendidikan	Ada/tidak*)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	Kesehatan	8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		10	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		15	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	Lingkungan Hidup	16	Pencemaran Udara	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient Dikawasan pemukiman atau industri}}{\text{Jumlah seluruh kabupaten dan kota}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas LH
		17	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari Dinas LH Tergolong baik sesuai dengan criteria Adipura
		18	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		19	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
4	Pekerjaan Umum	20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan provinsi}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas PU
		21	Rumah tangga Persanitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		22	Kawasan kumuh	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
5	Tata Ruang	23	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
6	Perencanaan Pembangunan	24	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD	Ada/tidak	Ada/ tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD
		25	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD	Ada/tidak	Ada/ tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD
		26	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD	Ada/tidak	Ada/ tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD
		27	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD
7	Perumahan	28	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		29	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
8	Kepemudaan & Olahraga	30	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		31	Lapangan olahraga	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
9	Penanaman Modal	32	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2015} - \text{Realisasi PMDN 2014}}{\text{Realisasi PMDN 2014}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
10	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		34	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
11	Kependudukan & Catatan Sipil	35	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada	. Ada/ tidak ada	Sumber data dari Dukcaoil
12	Ketenagakerjaan	36	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota Jumlah pekerja/buruh pes
		37	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
13	Ketahanan Pangan	38	Regulasi ketahanan pangan	Ada/Tidak	. Ada/ tidak ada	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan
		39	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja/PPA
		41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
15	KB & KS	42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		43	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
16	Perhubungan	44	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
17	Komunikasi & Informatika	45	Web site milik pemerintah daerah	Ada/Tidak		Sumber data dari Dinas Kominfo
		46	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun	.....	Sumber data dari Dinas Kominfo
18	Pertanahan	47	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
19	Kesbang & Politik	48	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	.....	Sumber data dari Kesbangpol
		49	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	.....	Sumber data dari Kesbangpol
20	Otonomi Daerah	50	Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	.....	Sumber data dari Dinas Kominfo/Biro Pemerintahan
		51	Tapal batas	$\frac{\text{Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan}}{\text{Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Biro Pemerintahan
21	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	52	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
22	Sosial	53	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	.....	Sumber data dari Dinas Sosial

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		54	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Sosial
23	Budaya	55	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	.....	Sumber data dari Dinas Budpar
		56	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	.....	Sumber data dari Dinas Budpar
24	Statistik	57	Buku "propinsi dalam angka"	Ada/Tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA
		58	Buku "PDRB provinsi"	Ada/Tidak	Ada/tidak*)	Sumber data dari BAPPEDA
25	Kearsipan	59	Pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Badan/Dinas Kearsipan
		60	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	.....	Sumber data dari Badan/Dinas Kearsipan
26	Perpustakaan	61	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	.....	Sumber data dari Badan/Dinas Perpustakaan
		62	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani}}$	.....	Normalisasi

#### URUSAN PILIHAN

1	Kelautan & perikanan	1	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan}}$	.....%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Ekspor hasil perikanan	$\frac{\text{Nilai export hasil perikanan (ton pertahun)}}{\text{Target daerah}}$	.....%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		3	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
2	Pertanian	4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari buku PDRB sector pertanian (harga berlaku)
3	Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
		7	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	8	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambangan Liar yang ditertibkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pertambangan/E SDM
		9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari buku PDRB sector pertambangan (harga berlaku)
5	Pariwisata	10	Kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
		11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari buku PDRB sektor jasa, hotel, restoran (harga berlaku)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
6	Industri	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari buku PDRB sektor industri (harga berlaku)
		13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Sumber data dari agregasi Kabupaten dan Kota
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari buku PDRB sektor perdagangan (harga berlaku)
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	US\$.....	Sumber data dari Dinas Perdagangan
8	Transmigrasi	16	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota}}$	.....%	Normalisasi

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KABUPATEN: -----

(1)	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ----- Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah <sup>1</sup> seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ----- Unit.	..... %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : --- ---Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	..... Hr	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Rp. ....../ Tidak dipungut	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparatur Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2015 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2015, sebanyak = ----- orang - Penduduk pada akhir tahun 2015, berjumlah = ----- orang	... per 10.000 penduduk	Sumber data dari BKD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada/tidak ada	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---- --Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak ada	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2015,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal --- --- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016.	Tepat / tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja		10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2015, disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2016	Tepat/tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan	
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian Laporan Kinerja sesuai jadwal yg telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2015. disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal ----- 2016	Tepat/tidak	Normalisasi	
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan ----- 2) Urusan ----- 3) Urusan ----- 4) Urusan ----- 5) Urusan ----- 6) Urusan -----	..... Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2015, sebanyak 6 urusan.	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2015	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2015, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst---	..... MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> <sup>2</sup>	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ----- prioritas.  - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program/agenda prioritas-	..... %	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2015 (APBD) = ----- urusan.	..... %	Sumber data : sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2015.
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2015	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2015	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD 2015. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2014).	Tepat/ tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- ( pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----- 4) Urusan PU Rp. -----	..... %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi belanja per-urusan(saat			

<sup>2</sup> Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
					5) Urusan Sosial Rp. ----- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ----- 7) Urusan Koperasi Rp. ----- 8) Urusan Satpol PP Rp. ----- 9) <u>Urusan Kependudukan &amp; Capil Rp. -----</u> Total Belanja pelayanan dasar Rp. -----  Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. -----		evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
		19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan Rp. -----</u> Total Belanja Pend & Kes Rp. -----	..... %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - SKPD lain yang melaksanakan urusan pendidikan
	Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> <sup>3</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ----- Tahun ----- tentang ----- (standar pelayanan publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum
	Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS kabupaten tahun 2015 sebanyak ----- orang.  Jumlah penduduk kabupaten tahun 2015 sebanyak ----- orang-	-----	Pembilang : Sumber data dari BKD  Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
		22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD

<sup>3</sup> Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kelembagaan	23	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit 7) Kecamatan/Distrik = ---- unit Jumlah SKPD = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Bagian Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2015, sebanyak ----- Perda ( Daftar terlampir)	... PERDA	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2015	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, sebanyak ----- PERDA.	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2015 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2015, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2015, sebanyak----- keputusan.	... %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2015 x 100%	- Keputusan Bupati tahun 2015, sebanyak -- ---- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2015 yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan.	.... %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjuti Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Kabupaten dalam tahun 2015 x 100%	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Perbup. - Peraturan Bupati dalam tahun 2015, sebanyak ----- Perbup.	.... %	Sumber data dari Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2015 tentang - ---- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2015 tentang - ---- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak -----	.... %	Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Medianya :----- - Sebutkan Perbup nomor ----- tahun ----- tentang -----.	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. -----  Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. - -----	.... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp-----  - DAU Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD	34	<u>Belanja Langsung</u> terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp-----  - Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: -----	Opini tahun 2015 = -----  Opini tahun 2016= -----	Opini: 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i> ); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i> ); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i> ), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i> ). Opini LHP Tahun 2015, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2015, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2015, sebesar Rp -- ----- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA  Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015, sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak ----- temuan.	..... %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2015 terhadap <u>potensi PAD</u> <sup>4</sup>	Jumlah realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 APBD	.... %	Sumber data dari BPKAD , angka pembagi menggunakan potensi PAD dalam target tahunan dalam RPJMD

<sup>4</sup> Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2015 - PAD 2014) : PAD 2014 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp.----	.... %	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015	Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari 1) -----, 2) -----, 3) -----, 4) Dst -----.	.... Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses E-procurement
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2015	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2015, sebanyak ----- ijin	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

KABUPATEN : .....

NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak -- --- program	..... %	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:  1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Ada -----SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud`adalah SOP tehnik adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	..... %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak --- -- - Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	.....%	Sumber data BKD/DUK SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.

<sup>1</sup> Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPND terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS SKPD , sebanyak ----- personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	.....	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ---- -org.	..... %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----- org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- -- jbt.	..... %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. .... .	..... jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan
			10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak -----	..... %	Sumber data SKPD Mengacu dokumen RKPd tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
			11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir	- Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		SKPD		dalam RKA SKPD	dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	..... %	dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.	..... %	Sumber data dari dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp -----	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2015 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Tidak Ada/ Ada sebanyak ---- --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- . - Asset yang dikuasai SKPD, Sebesar Rp. -----.	..... %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana masyarakat partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	Jumlah sebanyak ----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KABUPATEN : .....

NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan -----

2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program	..... %	..... %	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:  1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:  5. SOP ttg ----- 6. SOP ttg ----- 7. SOP ttg ----- 8. Dst -----	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud`adalah SOP tehnis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	..... %	..... %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah	- Jabatan yang terisi sebanyak -----	- Jabatan yang terisi sebanyak -----			Sumber data BKD/DUK SKPD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	<b>DAERAH</b>			terisi	jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak -----	- Jabatan yang ada, sebanyak -----	..... %	..... %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --- -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak -----. personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak -----. personil  - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil	-----	-----	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org.  - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org.  - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.	..... %	..... %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- - org.  - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- -- org.  - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	..... %	..... %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. ....	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. ....	..... jenis dokumen	..... jenis dokumen	Sumber data yang BAPPEDA/SKPD bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RPKD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlahb Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ----- -- program.  - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak --- ----	- Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ---- ---- program.  - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak - -----	..... %	..... %	Mengacu dokumen RPKD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- ---- program.  - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA RPKD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- ---- program.  - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	..... %	..... %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- ---- program.  - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- ---- program.	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- ---- program.  - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ----- ---- program.	..... %	..... %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015..
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, -----  - Total Belanja APBD, sebesar -----	- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, -----  - Total Belanja APBD, sebesar -----	..... %	..... %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. -----  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. -----  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	..... %	..... %	Mengacu LKD tahun 2015.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	-  - Total belanja pemeliharaan SKPD,	-  - Total belanja pemeliharaan SKPD,	..... %	..... %	Mengacu LKD tahun 2015.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				dan jasa (realisasi)	SKPD) x 100%	sebesar Rp. -----  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. -----	sebesar Rp. -----  - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----			
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	..... %	Mengacu APBD tahun 2015.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. .... 2. .... 3. ....	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. .... 2. .... 3. ....	Tidak Ada/  Ada sebanyak -- ----- jenis :	Tidak Ada/  Ada sebanyak -- ----- jenis :	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp ----- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp -----.	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp---- - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	..... %	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

KABUPATEN:-----

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>1</b>	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>2</b>	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15th ke atas}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>3</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>4</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>5</b>	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>6</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>7</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>8</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>9</b>	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>10</b>	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>11</b>	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>12</b>	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>13</b>	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>14</b>	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>15</b>	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>16</b>	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>17</b>	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>18</b>	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu}}{\text{Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>19</b>	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>20</b>	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama}} \times 100\%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>21</b>	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1}}{\text{Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>22</b>	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Lingkungan Hidup	23	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan
		24	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura
		25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		26	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah
4	Pekerjaan Umum	27	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)
		28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		29	Rumah Tangga Per-sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>30</b>	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
<b>5</b>	<b>Tata Ruang</b>	<b>31</b>	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
<b>6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>32</b>	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		<b>33</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		<b>34</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		<b>35</b>	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA
<b>7</b>	<b>Perumahan</b>	<b>36</b>	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		<b>37</b>	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		<b>38</b>	Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas PU

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Kepemudaan & Olahraga	39	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil
40		Lapangan olahraga .	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$ <p>Lapangan olah raga adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lap sepakbola, = ----- lap</li> <li>2. lap basket, = ----- lap</li> <li>3. lap volley, , = ----- lap</li> <li>4. lap. bulu tangkis, = ----- lap</li> <li>5. <u>kolam renang.</u> , = ----- lap</li> </ol> <p>Jumlah = ----- lap</p>	.....	Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri	
9	Penanaman Modal	41	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2015} - \text{Realisasi PMDN 2014}}{\text{Realisasi PMDN 2014}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)
10	Koperasi & UKM	42	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data Dinas Koperasi
		43	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP kecil
11	Kependudukan & Catatan Sipil	44	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data Dinas Duk Capil

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>45</b>	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah\_penduduk}} \times 1000$	.....	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		<b>46</b>	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah/ Belum *)	Sumber data dari Dinas Dukcapil
<b>12</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>	<b>47</b>	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan
		<b>48</b>	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)
<b>13</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>	<b>49</b>	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura atau Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan
		<b>50</b>	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil
<b>14</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>51</b>	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	.....%	Melampirkan rekap data pekerja perempuan
		<b>52</b>	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\text{Jumlah\_anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil
15	KB & KS	54	Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari BKKBN
		55	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan PLKB/PKB}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari BKKBN/ Dinas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS
16	Perhubungan	56	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}}$	.....	Sumber data dari dinas perhubungan
17	Komunikasi & Informatika	57	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada/tidak *)	Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo
		58	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	.....kali	Sumber Data dari (Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo
18	Pertanahan	59	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100 \%$	.....%	Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat)
		60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pertanahan dengan melampirkan rekap surat permasalahan
		61	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pertanahan
19	Kesbang & Politik	62	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	.....Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>63</b>	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	.....Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol
<b>20</b>	<b>Otonomi Daerah</b>	<b>64</b>	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	.....buah	Sumber data dari Dinas Kominfo
		<b>65</b>	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada/tidak*)	Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM
<b>21</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat &amp; Desa</b>	<b>66</b>	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		<b>67</b>	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>22</b>	<b>Sosial</b>	<b>68</b>	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	..... .buah	Sumber data dari Dinas Sosial
		<b>69</b>	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Sosial
		<b>70</b>	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Sosial
<b>23</b>	<b>Budaya</b>	<b>71</b>	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	..... kali	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		<b>72</b>	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	..... buah	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>73</b>	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs \& kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
<b>24</b>	<b>Statistik</b>	<b>74</b>	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
		<b>75</b>	Buku "PDRB kabupaten"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
<b>25</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>76</b>	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$	.....%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip</li> <li>Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi</li> </ul>
		<b>77</b>	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan	.....	Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip
<b>26</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>78</b>	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	.....	Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah
		<b>79</b>	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10-58 thn)}}$	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah</li> <li>Sumber data penyebut dari Dukcapil</li> </ul>
<b>URUSAN PILIHAN.</b>						
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1</b>	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		<b>2</b>	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		<b>3</b>	Produktivitas padi atau bahan pangan utama	Produksi tanaman padi/bahan	.....	Sumber data dari Dinas

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pertanian		lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}}$		Pertanian
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)
3	Kehutanan	5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
		6	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	7	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambangan Liar yang ditertibkan}}{\text{luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas ESDM. Apabila tidak ada penambangan liar agar dibuatkan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang.
		8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas ESDM atau buku PDRB sector Pertambangan dan Penggalian (harga berlaku)
5	Pariwisata	9	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	.....orang	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata
		10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga berlaku

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Industri	11	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga berlaku)
		12	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2015} - \text{Jumlah Industri tahun 2014}}{\text{Jumlah Industri s/d tahun 2015}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Perindustrian
7	Perdagangan	13	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku)
		14	Ekspor Bersih Perdagangan	$\text{Nilai ekspor bersih} = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$	US\$ .....	Sumber data dari Dinas Perdagangan
8	Transmigrasi	15	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\%$	.....%	Sumber data `Dinas Transmigrasi



**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

KOTA : -----

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ----- Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah <sup>1</sup> seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2015, sebanyak ----- Unit.	..... %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : --- ---Tahun ----- tentang -----	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota
		Peraturan ttg kependudukan	4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP  - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP	..... %	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang -----	Rp. ....../ Tidak dipungut	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparatur Trantibum)	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2015 dibagi 10.000 penduduk x 100 %	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2015, sebanyak = ----- orang  - Penduduk pada akhir tahun 2015, berjumlah = ----- orang	... per 10.000 penduduk	Sumber data dari BKD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Ada/tidak ada	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---- --Tahun ----- tentang -----	Ada/ tidak ada	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2015,	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2015 disampaikan pada tanggal --- ---- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016.	Tepat / tidak	Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja		10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2015, disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ----- 2016  - Laporan Kinerja tahun 2015. disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor----- tanggal ----- 2016	Tepat/tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan	
		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian laporan kinerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan	Bukti Pengiriman: Laporan Kinerja tahun 2015. disampaikan pada tanggal ----- 2016 sesuai surat pengantar Nomor-----tanggal ----- 2016	Tepat/tidak	Normalisasi	
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)		12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak ----- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan ----- 2) Urusan ----- 3) Urusan ----- 4) Urusan ----- 5) Urusan ----- 6) Urusan -----	..... Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2015, sebanyak 6 urusan.	

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2015	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2015, sebanyak ----- MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 3) Dst---	..... MOU	Sumber data dari Bagian Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah <u>prioritas pembangunan nasional</u> <sup>2</sup>	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ----- prioritas.  - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program/agenda prioritas-	..... %	Sumber data dari BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2015 (APBD) = ----- urusan.	..... %	Sumber data : sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2015.
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2015	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2015	Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- APBD 2015. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2014).	Tepat/ tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : -----Tahun ----- tentang ----- ( pengelolaan keuangan daerah)	Ada/tidak	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) Urusan Kesehatan Rp. ----- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----- 4) Urusan PU Rp. -----	..... %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi			

<sup>2</sup> Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
					5) Urusan Sosial Rp. ----- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ----- 7) Urusan Koperasi Rp. ----- 8) Urusan Satpol PP Rp. ----- 9) <u>Urusan Kependudukan &amp; Capil Rp. -----</u> Total Belanja pelayanan dasar Rp. -----  Total Belanja APBD 2015, sebesar Rp. -----		menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).
		19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2015. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----- 2) <u>Urusan Kesehatan Rp. -----</u> Total Belanja Pend & Kes Rp. -----	..... %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - SKPD lain yang melaksanakan urusan pendidikan
	Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang <u>Standar Pelayanan Publik</u> <sup>3</sup> sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ----- Tahun ----- tentang ----- (standar pelayanan publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum
	Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk	Jumlah PNS Kota tahun 2015 sebanyak ----- orang.  Jumlah penduduk Kota tahun 2015 sebanyak -- ----- orang-	----	Pembilang : Sumber data dari BKD  Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
		22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ----- (tentang kepegawaian)	Ada/tidak	Sumber data dari BKD

<sup>3</sup> Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Kelembagaan	23	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = ---- unit 2) Dinas = ---- unit 3) Badan = ---- unit 4) Kantor = ---- unit 5) Rumah Sakit = ---- unit 6) Lembaga Teknis lainnya = ---- unit 7) <u>Kecamatan/Distrik</u> = ---- unit Jumlah SKPD = ---- unit	----- unit	Sumber data dari Bagian Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2015, sebanyak ----- Perda ( Daftar terlampir)	... PERDA	Sumber data dari Bagian Hukum
		RAPERDA yang diajukan tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2015	- RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, sebanyak ----- RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, sebanyak ----- PERDA.	... %	Sumber data dari Bagian Hukum
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2015 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2015, sebanyak----- keputusan. - Keputusan DPRD dalam tahun 2015, sebanyak----- keputusan.	... %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjuti keputusan Walikota	27	Keputusan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan walikota dalam tahun 2015 x 100%	- Keputusan Walikota tahun 2015, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan walikota tahun 2015 yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- keputusan.	.... %	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjuti Peraturan Bupati	28	Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan Walikota dalam tahun 2015 x 100%	- Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak ----- Per-Walikota. - Peraturan Walikota dalam tahun 2015, sebanyak ----- Per-Walikota.	.... %	Sumber data dari Bagian Hukum

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak ----- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ----- Tahun 2015 tentang - ---- 2) Perda Nomor ----- Tahun 2015 tentang - ---- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak -----	.... %	Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun ----- tentang ----- (konsultasi publik)	Ada/tidak	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Medianya :----- - Sebutkan Perbup nomor ----- tahun ----- tentang -----.	Ada/tidak	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 sebesar Rp. -----  Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2015 sebesar Rp. - -----	.... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp-----  - DAU Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD	34	<u>Belanja Langsung</u> terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD tahun 2015, sebesar Rp-----  - Total Belanja APBD Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015, dengan opini: ----- - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: -----	Opini tahun 2015 = -----  Opini tahun 2016= -----	Opini: 1) WTP/ <i>unqualified opinion</i> ); 2) WDP/ <i>qualified opinion</i> ); 3) TMP/ <i>disclaimer opinion</i> ), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/ <i>adverse opinion</i> ). Opini LHP Tahun 2015, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2015, sebesar Rp ----- - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2015, sebesar Rp -- ----- - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2015, sebesar Rp. -----	.... %	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA  Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Kota	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2015, sebanyak ----- temuan. - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak ----- temuan.	..... %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti.
12	PENGLOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2015 terhadap <u>potensi PAD</u> <sup>4</sup>	Jumlah realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD X 100%	- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp. ----- - Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 APBD	.... %	Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD)

<sup>4</sup> Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2015 - PAD 2014) : PAD 2014 X 100%	- Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp. ---- - Total PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp.----	.... %	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015	Penghargaan yang diterima, sebanyak ----- yang terdiri dari 1) -----, 2) -----, 3) -----, 4) Dst -----.	.... Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.	Ada/Tidak	Sumber data dari ULP. Data berupa proses E-procurement
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam tahun 2015	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2015, sebanyak ----- ijin	... ijin	Sumber data dari Kantor PTSP

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

KOTA : .....

NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak -- --- program	..... %	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: 1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Ada -----SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	..... %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak --- -- - Jabatan yang harus ada, sebanyak -----	.....%	Sumber data BKD/DUK SKPD
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.

<sup>1</sup> Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPND terkait.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	- PNS SKPD , sebanyak ----- personil - Total PNS Kota, sebanyak ----- personil	.....	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.
7			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak ---- -org.	..... %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.	
8			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- org. - Jabatan yang ada, sebanyak --- -- jbt.	..... %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. .... .	..... jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/SKPD yang bersangkutan
10			Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak -----	..... %	Sumber data SKPD Mengacu dokumen RKPd tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.	

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	..... %	Sumber data SKPD. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.	..... %	Sumber data dari dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ----- - Total Belanja APBD, sebesar Rp -----	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2015 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ----- - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----- - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Tidak Ada/ Ada sebanyak ---- --- jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan SKPD. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang/asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. ---- . - Asset yang dikuasai SKPD, Sebesar Rp. -----.	..... %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana masyarakat partisipasi	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	Jumlah sebanyak ----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/SKPD.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KOTA : .....

NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan -----

2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPKN) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program	..... %	..... %	Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:  1. SOP ttg ----- 2. SOP ttg ----- 3. SOP ttg ----- 4. Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:  5. SOP ttg ----- 6. SOP ttg ----- 7. SOP ttg ----- 8. Dst -----	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	Ada ----- --SOP / Tidak Ada :	SOP yg dimaksud`adalah SOP tehnik adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN</b>	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----.  - PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak -----.  - PERDA yang seharusnya, sebanyak -----	..... %	..... %	Normalisasi
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah	- Jabatan yang terisi sebanyak -----	- Jabatan yang terisi sebanyak -----			Sumber data BKD/DUK SKPD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	<b>DAERAH</b>			terisi	jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada, sebanyak -----	- Jabatan yang ada, sebanyak -----	..... %	..... %	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --- -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -- -----.	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Sumber data BKD/SKPD. Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota	- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak -----. personil - Total PNS Kota, sebanyak - ---- personil	- PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak -----. personil - Total PNS Kota, sebanyak ----- personil	-----	-----	Sumber data Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015/ BKD.
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.	..... %	..... %	Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---- - org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak --- -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.	..... %	..... %	Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. ....	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .... 2. .... 3. ....	..... jenis dokumen	..... jenis dokumen	Sumber data yang BAPPEDA/SKPD bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD x 100%	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ----- -- program.  - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan , sebanyak -----	- Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak ---- ---- program.  - Jumlah Program Renja SKPD yang ditetapkan sebanyak -----	..... %	..... %	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ---- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ---- program.	..... %	..... %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.	- Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ---- program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ---- program.	..... %	..... %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015..
6	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total belanja SKPD, sebesar Rp, ----  - Total Belanja APBD, sebesar -----	- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, ----  - Total Belanja APBD, sebesar -----	..... %	..... %	Sumber data dari APBD tahun 2015 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. -----  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. -----  - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	..... %	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	-  - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----	-  - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----	..... %	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----  - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----  - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----	..... %	..... %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2015 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. .... 2. .... 3. ....	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:  1. .... 2. .... 3. ....	Tidak Ada/  Ada sebanyak -- ----- jenis :	Tidak Ada/  Ada sebanyak -- ----- jenis :	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset SKPD	18	Adanya inventarisasi barang/ asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/ asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Ada/ tidak ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp -----  - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp -----.	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ----- asset.  - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.	..... %	..... %	Sumber data dari BPKAD
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. ....	Sebutkan jenisnya 1. .... 2. .... 3. .... 4. ....	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Jumlah sebanyak -- ---- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data lampirkan foto)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) -----	Urusan (2) -----	Urusan (1) ---- --	Urusan (2) ---- --	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						5. ....	5. ....			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- -	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ SKPD

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN  
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015**

KOTA: -----

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>URUSAN WAJIB</b>						
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>1</b>	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>2</b>	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15th ke atas}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>3</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>4</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>5</b>	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		<b>6</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>7</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>8</b>	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>9</b>	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>10</b>	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>11</b>	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>12</b>	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>13</b>	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		<b>14</b>	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>15</b>	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	<p>Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama</p>	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>16</b>	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	<p>Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama</p>	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>17</b>	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	<p><u>Jumlah Desa / Kelurahan UCI</u> x 100 %</p> <p>Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan</p>	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>18</b>	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	<p>Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama</p>	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>19</b>	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	<p>Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x 100 %</p> <p>Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama</p>	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>20</b>	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	<p>Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x 100%</p> <p>Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama</p>	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>21</b>	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<p>Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh maskin di Kota</p>	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan
		<b>22</b>	Cakupan kunjungan bayi	<p>Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ----- x 100 %</p> <p>Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama</p>	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Lingkungan Hidup	23	Penanganan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan
		24	Kebersihan	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik}}{\text{Jumlah seluruh pasar tradisional}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura
		25	Tempat pembuangan sampah (TPS) per s atuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		26	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah
4	Pekerjaan Umum	27	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)
		28	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100 \%$	.....%	Normalisasi
		29	Rumah Tangga Per-sanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang ( jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>30</b>	Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
<b>5</b>	<b>Tata Ruang</b>	<b>31</b>	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) tdk termasuk hutan lindung
<b>6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>	<b>32</b>	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		<b>33</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		<b>34</b>	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada/tidak *)	Sumber data dari BAPPEDA
		<b>35</b>	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA
<b>7</b>	<b>Perumahan</b>	<b>36</b>	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal di rumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		<b>37</b>	Lingkungan pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100 \%$	.....%	Pembilang dan penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		<b>38</b>	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni	.....%	Sumber data dari Dinas PU

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.		
8	Kepemudaan & Olahraga	39	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota ----- x 1000 Jumlah penduduk	.....	Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil
		40	Lapangan olahraga .	Jumlah lapangan olahraga di Kota ----- x 1000 Jumlah penduduk Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = ---- lap 2. lap basket, = ---- lap 3. lap volley, , = ---- lap 4. lap. bulu tangkis, = ---- lap 5. <u>kolam renang.</u> , = ---- lap Jumlah = ---- lap	.....	Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri
9	Penanaman Modal	41	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2015 – Realisasi PMDN 2014 ----- x 100 % <b>Realisasi PMDN 2015</b>	.....%	Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)
10	Koperasi & UKM	42	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	.....%	Sumber data Dinas Koperasi
		43	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil ----- x 100 % Jumlah seluruh UKM	.....%	Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP kecil
11	Kependudukan & Catatan Sipil	44	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ----- x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)	.....%	Sumber data Dinas Duk Capil

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>45</b>	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah\_penduduk}} \times 1000$	.....	Sumber data dari Dinas Dukcapil
		<b>46</b>	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah/ Belum *)	Sumber data dari Dinas Dukcapil
<b>12</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>	<b>47</b>	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	$\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif}}{\text{Jumlah pekerja/buruh}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan
		<b>48</b>	Pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)
<b>13</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>	<b>49</b>	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Ada/tidak*)	Sumber data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura atau Dinas/Badan yang menangani ketahanan pangan
		<b>50</b>	Ketersediaan pangan utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	.....	Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil
<b>14</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>51</b>	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	.....%	Melampirkan rekap data pekerja perempuan
		<b>52</b>	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\text{Jumlah\_anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		53	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil
15	KB & KS	54	Prevalensi peserta KB aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari BKKBN
		55	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan PLKB/PKB}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari BKKBN/ Dinas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS
16	Perhubungan	56	Angkutan darat	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}}$	.....	Sumber data Dians Perhubungan
17	Komunikasi & Informatika	57	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada/tidak *)	Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo
		58	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun	.....kali	Sumber Data dari (Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo
18	Pertanahan	59	Luas lahan bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di suatu daerah}}{\text{Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah}} \times 100 \%$	.....%	Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat)
		60	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pertanahan dengan melampirkan rekap surat permasalahan
		61	Penyelesaian Ijin Lokasi	$\frac{\text{Jumlah Ijin Lokasi}}{\text{Permohonan Ijin Lokasi}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pertanahan
19	Kesbang & Politik	62	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	.....Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>63</b>	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	.....Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol
<b>20</b>	<b>Otonomi Daerah</b>	<b>64</b>	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	.....buah	Sumber data dari Dinas Kominfo
		<b>65</b>	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada/tidak*)	Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM
<b>21</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat &amp; Desa</b>	<b>66</b>	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		<b>67</b>	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>22</b>	<b>Sosial</b>	<b>68</b>	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	..... .buah	Sumber data dari Dinas Sosial
		<b>69</b>	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Sosial
		<b>70</b>	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Sosial
<b>23</b>	<b>Budaya</b>	<b>71</b>	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	..... kali	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		<b>72</b>	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	..... buah	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>73</b>	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Total Benda, situs \& kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$	.....%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
<b>24</b>	<b>Statistik</b>	<b>74</b>	Buku "Kota dalam angka"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
		<b>75</b>	Buku "PDRB Kota"	Ada atau tidak		Sumber data dari Bappeda
<b>25</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>76</b>	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$	.....%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip</li> <li>Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi</li> </ul>
		<b>77</b>	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan	.....	Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip
<b>26</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>78</b>	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah}}$	.....	Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah
		<b>79</b>	Pengunjung perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10-58 thn)}}$	.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah</li> <li>Sumber data penyebut dari Dukcapil</li> </ul>
<b>URUSAN PILIHAN.</b>						
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1</b>	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton/tahun)}}{\text{Target Daerah (Ton/tahun)}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		<b>2</b>	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Pertanian	3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}}$	.....	Sumber data dari Dinas Pertanian
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)
3	Kehutanan	5	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
		6	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Kehutanan
4	Energi dan SDM	7	Pertambangan tanpa ijin	$\frac{\text{Luas Penambangan Liar yang ditertibkan}}{\text{luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas ESDM. Apabila tidak ada penambangan liar agar dibuatkan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang.
		8	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas ESDM atau buku PDRB sector Pertambangan dan Penggalian (harga berlaku)
5	Pariwisata	9	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun	.....orang	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata
		10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						berlaku
6	Industri	11	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga berlaku)
		12	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2015} - \text{Jumlah Industri tahun 2014}}{\text{Jumlah Industri s/d tahun 2015}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Perindustrian
7	Perdagangan	13	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	.....%	Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku)
		14	Ekspor Bersih Perdagangan	$\text{Nilai ekspor bersih} = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$	US\$ .....	Sumber data dari Dinas Perdagangan
8	Transmigrasi	15	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\%$	.....%	Sumber data Dinas Transmigrasi

